



DISHUB
KOTA DUMAI



DUMAI!
BERKHIDMAT!
MENUJU KOTA IDAMAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)



#KhidmatPenerangan



@dishub.kotadumai

Dinas Perhubungan Dumai

+62 811-7678-881

www.dishub.dumaikota.go.id

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja disusun mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Dishub. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dicapai pada Tahun 2022 yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Akhirnya semoga laporan kinerja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

KEPALA,

SAID EFFENDI, SE

Pembina

NIP. 19800201 200604 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan	
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	
1.3 Sumber Daya Manusia	
1.4 Potensi dan Permasalahan Strategis.....	
1.5 Dasar Hukum.....	
1.6 Sistematika Pelaporan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	
2.2 Perjanjian Kinerja.....	
2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishub Kota Dumai ...	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
3.2 Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP.....	
LAMPIRAN	
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Rencana Kinerja Tahunan 2022	
Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022	
Pengukuran Kinerja Tahunan/Evaluasi IKU	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.....
- Gambar 2 Jumlah ASN DISHUB Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan.....
- Gambar 3 Jumlah ASN DISHUB Kota Dumai Menurut Golongan Ruang.....
- Gambar 4 Jumlah ASN DISHUB Kota Dumai Menurut Jabatan.....
- Gambar 5 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasarana DISHUB Kota Dumai Tahun 2021-2026.....
- Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Utama DISHUB Kota Dumai

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

a. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 Bab II Pelaporan Keuangan dan Kinerja mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) reviu dan evaluasi kinerja.

Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai pembina dan pengelola urusan administrasi dan ketatausahaan, perumusan kebijaksanaan teknis, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, perencanaan program/kegiatan, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan dan pemberian perizinan, pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi, pembinaan dan penetapan standarisasi pelayanan,

pembinaan dan pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pembinaan dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta program keselamatan di bidang perhubungan, dan pembinaan disiplin serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kota Dumai ini disampaikan untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kota Dumai disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat di Bidang Transportasi. Secara umum Dinas Perhubungan Kota Dumai telah melaksanakan program, kegiatan dan arah kebijakan yang telah disetujui dengan hasil yang signifikan. Hasil pencapaian kinerja tahun 2022 secara umum menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Dumai telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKj-IP Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKj-IP Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah:

- 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai kepada Walikota Dumai dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*),

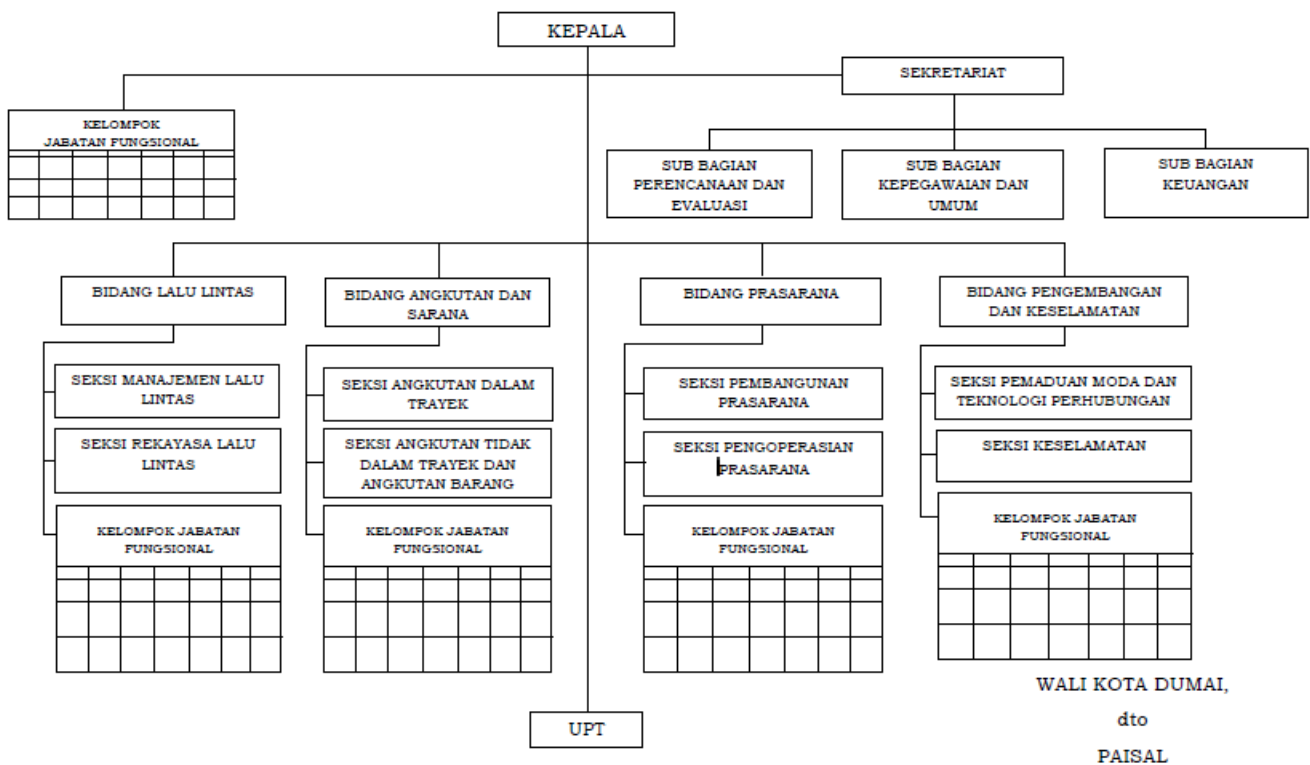
dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Perhubungan Kota Dumai.
- 3) Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai;
- 4) Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mengemban tugas wewenang dan tanggungjawab;

I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari Gambar 1.



Gambar 1
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dari Gambar diatas terlihat bahwa susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Angkutan dan Sarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Prasarana;

- b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi;
 - b. Seksi Keselamatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT
8. Satuan Pelayanan (SATPEL)

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang berhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai membawahi 1 Sekretariat dan 4 Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan umum, perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan, serta pembinaan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan UPT serta Satuan Pelayanan di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana, anggaran, program dan sub kegiatan Dinas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana, anggaran, program dan sub kegiatan Dinas;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan rencana, anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas;
- d. penyiapan bahan evaluasi serta pelaporan rencana, anggaran, program dan sub kegiatan Dinas;
- e. penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah;
- j. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di unit kerja dan satuan pelayanan di lingkungan Dinas;

- k. penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2. Bidang Lalu Lintas

Dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas yang berada dalam daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
3. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas; dan
5. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya

Bidang Lalu Lintas terdiri atas:

- 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Angkutan dan Sarana

Dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan orang dan/atau barang;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan orang dan/atau barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan orang dan/atau barang;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan kebijakan dibidang angkutan orang dan/atau barang;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan orang dan/atau barang; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya

Bidang Angkutan dan Sarana terdiri dari:

- 1) Seksi Angkutan Dalam Trayek
- 2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Prasarana

Dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, dengan uraian tugas sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, prasarana, pembangunan prasarana, dan pengoperasian prasarana transportasi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, prasarana, pembangunan prasarana, dan pengoperasian prasarana transportasi;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan kebijakan dibidang perencanaan, prasarana, pembangunan prasarana, dan pengoperasian prasarana transportasi;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan, prasarana, pembangunan prasarana, dan pengoperasian prasarana transportasi;
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Prasarana terdiri dari:

- 1) Seksi Pembangunan Prasarana
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan serta keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan serta keselamatan;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan serta keselamatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan serta keselamatan;
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari:

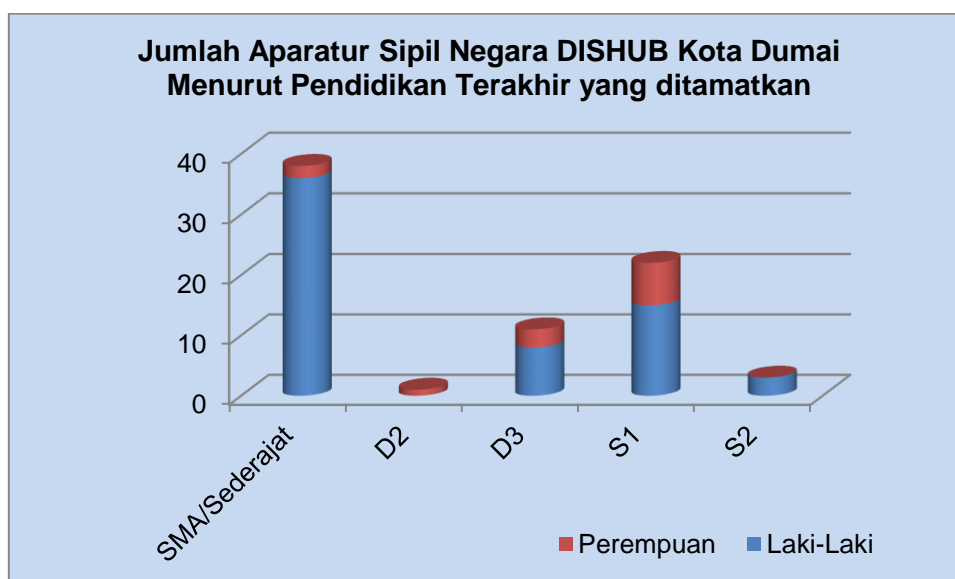
- 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
- 2) Seksi Keselamatan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Dumai didukung dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. UPT pada Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri dari:

1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A
2. UPT Perparkiran

I.3 Sumber Daya Manusia

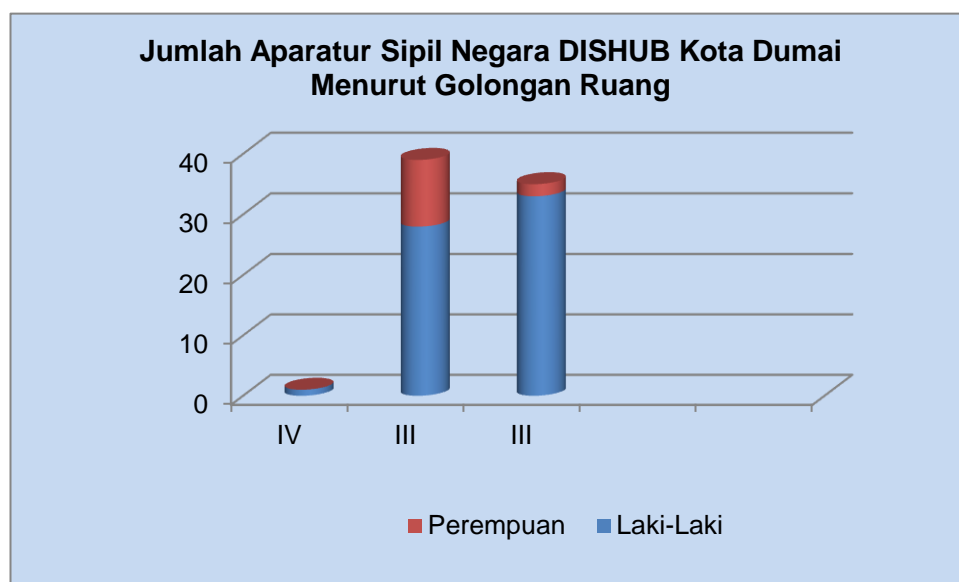
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan Kota Dumai per Desember 2022 adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, dimana 82,7% (62 org) berjenis kelamin laki-laki dan 17,3% (13 org) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai 2022 tersaji pada Gambar berikut ini :



Gambar 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DISHUB Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan
Sumber: Dishub Kota Dumai, 2022

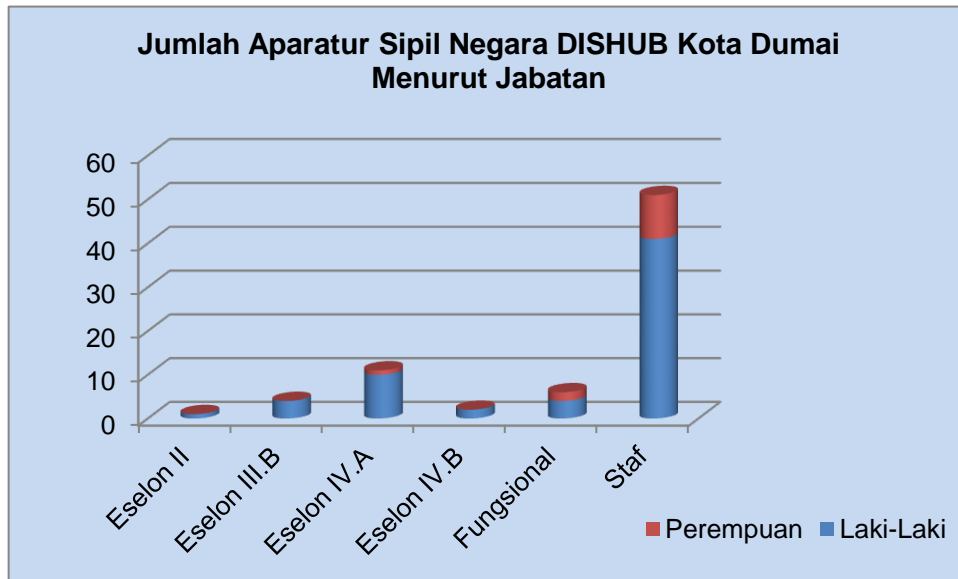
Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai didominasi oleh lulusan SMA/Sederajat (50,7%), lulusan S2 sebanyak 4,0% (3 orang), lulusan S1 sebanyak 29,3% (22 orang), dan lulusan D3 sebanyak 14,7% (11 orang), lulusan D2 sebanyak 1,3% (1 orang. Jika dilihat dari golongan ruang seperti yang tersaji pada Gambar 2, seluruh ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV.

Menurut golongan ruang, ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 57,9% (4 orang), mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 3,9% (3 orang). Sedangkan ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 38,2% (29 orang)



Gambar 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DISHUB Kota Dumai Menurut Golongan Ruang
Sumber: Dishub Kota Dumai, 2022

Jika dilihat dari jabatan yang diduduki seperti yang tersaji pada Gambar 3, Pejabat Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 94,4% (17 orang) sedangkan perempuan 5,6% (1 orang) dan Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang.



Gambar 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DISHUB Kota Dumai Menurut Jabatan
Sumber: Dishub Kota Dumai, 2022

I.4 Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang berhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya terminal Type C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan;
2. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota;
3. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap angkutan sewa, angkutan karyawan dan angkutan sekolah di area Kota Dumai;
4. Belum adanya penertiban terhadap pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai;
5. Rendahnya investasi pemerintah daerah pada sub sektor perparkiran;

6. Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi;
7. Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan;
8. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan di Kota Dumai;
9. Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.

Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut:

1. Peluang
 - a. Adanya regulasi terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Adanya pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas yakni *Area Traffic Control System (ATCS)* di persimpangan Kota Dumai;
2. Tantangan
 - a. Belum adanya dokumen perencanaan di Bidang Perhubungan;
 - b. Perlu adanya revitalisasi angkutan kota serta angkutan berbasis online yang kini menjamur di Kota Dumai serta menata ulang trayek angkutan kota di Kota Dumai;
 - c. Belum maksimalnya pengaturan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang masih menggunakan bahu jalan;

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah ***“Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan Infrastruktur Kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang”*** sehingga arus pergerakan lalu lintas orang dan barang serta jasa dapat menjangkau seluruh wilayah.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj-IP Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D).

I.4 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi perangkat daerah

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan inti dari LKj-IP yang menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan selama tahun 2022

Bab IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan upaya/langkah dinas mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka peningkatan kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya mampu memberikan informasi yang jelas, tegas dan akuntabel menyangkut program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Dumai khususnya dan pembangunan Pemerintah Kota Dumai pada umumnya.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN Provinsi Riau adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah "*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)*". Mengacu pada kedua Visi tersebut di atas dan memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2012-2026, adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI
YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU
(DUMAI KOTA IDAMAN)”**

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021- 2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Misi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perhubungan mengikuti Misi Ketiga Kota Dumai yakni sebagai berikut:

MISI III : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara

khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah.

Peran Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam hal ini berupa peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, pembenahan, pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas.

2.1.3 Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disusun tujuan Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah

“MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DAERAH”

2.1.4 Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

“MENINGKATNYA SARANAN DAN PRASARANA SERTA KESELAMATAN PERHUBUNGAN”

2.1.5 Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Dumai mencoba merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dirumuskan tersebut yaitu :

1. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;
2. Mengembangkan Jaringan listrik dipelosok dan membangun titik penerangan jalan umum dijalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

2.1.6 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan

Arah kebijakan dari strategi dan sasaran yang digunakan adalah:

1. Pengembangan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi;
2. Peningkatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi;
3. Pengembangan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan;

4. Peningkatan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN

Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasarana DISHUB Kota Dumai
Sumber: Dishub, 2022

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022
Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	60
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	60
		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	%	56
		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	%	48
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	50

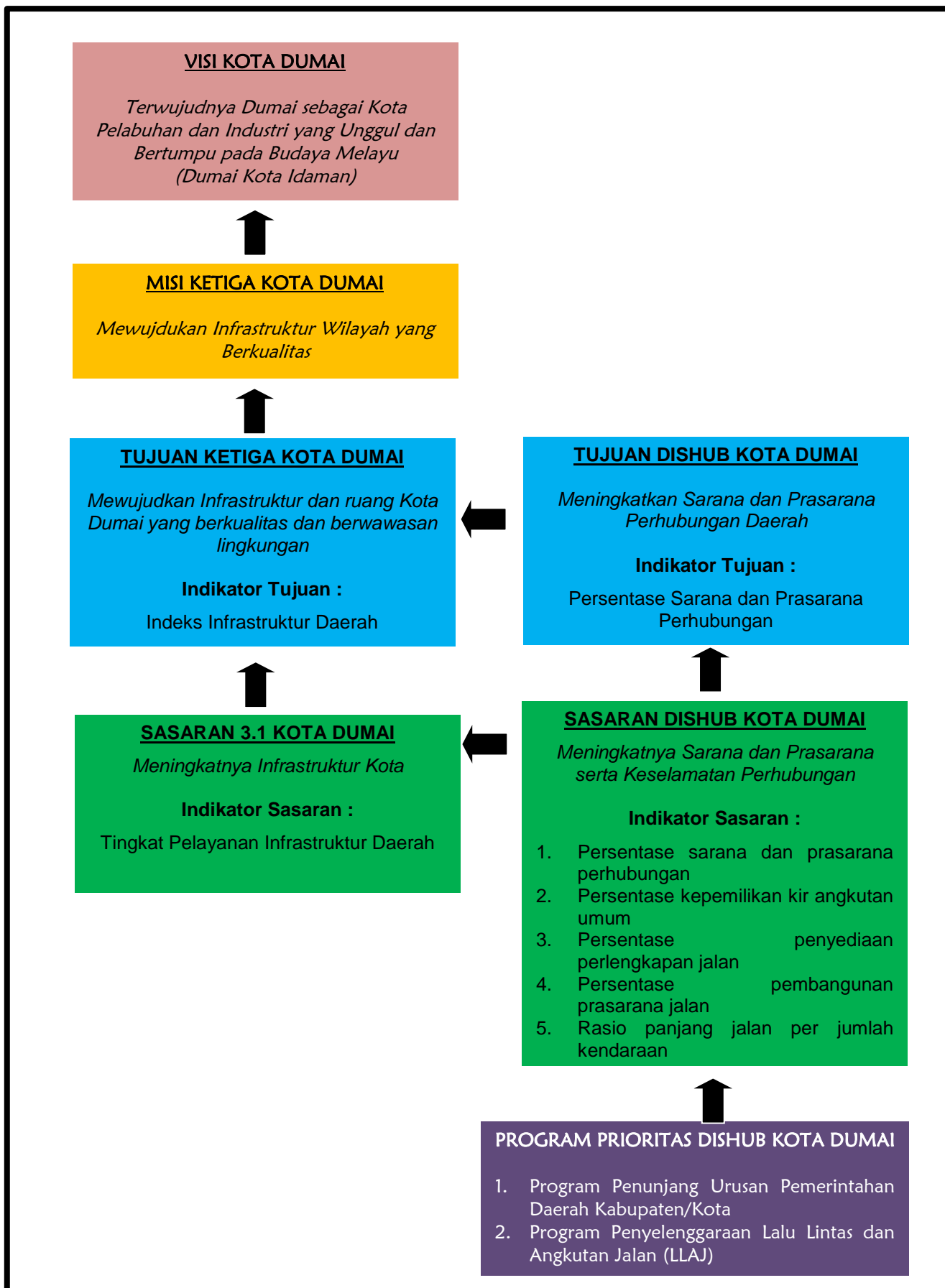
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 25.334.679.599
1.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 23.791.715.837
1.3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.022.963.762
1.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000

2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) DISHUB

Penetapan indikator kinerja utama DISHUB seperti yang tersaji pada Tabel 1 diatas pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 1 (satu) program prioritas yang secara rinci penjabarannya tersaji pada Gambar 2. Adapun indikator, target kinerja dan pendanaan indikatif masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2022
Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dishub Kota Dumai Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Dumai	5 Dokumen
			Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Dumai	12 Bulan
			Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan
			Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Dumai	10 Kegiatan



Gambar 6 Cascading Indikator Kinerja Utama DISHUB Kota Dumai, Sumber: Dishub, 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Dumai yang menggambarkan tercapai atau tidaknya outcome dan output pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada sub-bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2016-2021;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pengukuran yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 ini juga dikemukakan analisis- analisis tambahan untuk menggambarkan bagaimana perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki capaian kinerja pada periode-periode yang akan datang.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

SKALA PENILAIAN	
SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55	Kurang

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat 5 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2022. Kelima indikator yang dimaksud antara lain: (1) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan; (2) Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum; (3) Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan; (4) Persentase Pembangunan Prasarana Jalan dan (5) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan. Adapun hasil analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut:

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2022

Di dalam dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama seperti yang telah disebutkan diatas. Perbandingan antara target dan capaian setiap IKU tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator ini disusun dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan pada Tahun } n}{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Diketahui bahwa sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kota Dumai yakni pelabuhan penumpang Pelindo, Pelabuhan Ro-Ro, Bandara Pinang Kampai, Terminal Penumpang Tipe A, UPT. Perparkiran, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, Pos Retribusi, Parkir Khusus Ramayana, Jembatan penyeberangan Orang serta Halte yang tersebar di wilayah Kota Dumai.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan” tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 60%. Sampai tahun 2022, sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kota Dumai sebanyak 42 unit dengan target 70 unit. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

b) Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada Tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun } n} \times 100\%$$

KIR adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelaikan dari kendaraan secara teknis. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang telah memenuhi persyaratan dan bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan dan disahkan akan diberi tanda lulus uji. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 53 Ayat 1 dijelaskan bahwa uji berkala Kir diwajibkan untuk mobil penumpang, kendaraan barang, bus, kereta gandengan dan tempelan setiap 6 (enam) bulan sekali. Uji berkala kendaraan bermotor terdiri dari 3 (tiga) cakupan utama yakni:

1. Pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
2. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
3. Pemberian tanda lulus uji.

Adapun Tujuan Uji Kir kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor;
- b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor;
- c. Menekan angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kendaraan tidak laik jalan.
- d. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum” tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 60%.

Jumlah angkutan umum yang memiliki kir di tahun 2022 sebanyak 124 unit dibanding dengan jumlah angkutan umum pada tahun 2022 sebanyak 297 unit. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 70%.

c) Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada Tahun } n}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

Sesuai amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 25 disebutkan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa;

1. Rambu Lalu lintas;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
6. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; serta
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan atau diluar badan jalan.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan” tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 56%.

Pada tahun 2022, penyediaan perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan yakni pengadaan penerangan jalan umum terealisasi 883 unit lampu dari target 800 unit lampu dengan persentase 110%, pembangunan pedestrian sepanjang 198 m dari target 2.116,20 meter dengan persentase 9% dan penyediaan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas terealisasi 316 unit dari target 700 unit dengan persentase 45%, sehingga total keseluruhan indikator ini yakni 164% dengan rata-rata capaian sebesar 55%. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 98%.

d) Persentase Pembangunan Prasarana Jalan

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah prasarana jalan yang dibangun pada Tahun } n}{\text{Jumlah prasarana jalan yang seharusnya dibangun}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Pembangunan Prasarana Jalan” tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 48%.

Jumlah prasarana jalan berupa halte yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 29 unit yang tersebar di seluruh Kota Dumai sebagai berikut :

1. Halte SMPN Binsus;
2. Halte SMAN 2;
3. Halte TK Tunas Harapan;
4. Halte Disdukcapil;
5. Halte SMPN 2;
6. Halte PLN;
7. Halte Ramayana;
8. Halte Kampu STIA;
9. Halte Marlan Jaya;
10. Halte Beringin Patra;
11. Halte Hasan Basri
12. Halte Wilmar Arifin A1;
13. Halte Wilmar Arifin A2;
14. Halte Wilmar Arifin A3;
15. Halte Wilmar Arifin A4;
16. Halte Wilmar Arifin A5;
17. Halte Wilmar Arifin A6;
18. Halte Wilmar Arifin A7;
19. Halte Wilmar Arifin A8;
20. Halte SMAN 1;
21. Halte STT;
22. Halte SDN 005 Bukit Jin;
23. Halte Puskesmas Bukit Kayu Kapur;
24. Halte Wilmar Datuk Laksaman;
25. Halte Pelabuhan Penumpang;
26. Halte Simpang Sui;
27. Halte SMKN 1;
28. Halte Jaya Mukti;
29. Halte Taman Mitra.

Berdasarkan data diatas, maka pembangunan prasarana jalan tahun 2022 adalah sebesar 48%. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

e) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Kendaraan}}{\text{Panjang Jalan}} \times 100\%$$

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Jumlah kendaraan di Kota Dumai pada tahun 2022 sebanyak 80.528 unit kendaraan dengan rincian mobil penumpang sebanyak 14.768 unit, truk sebanyak 6.366 unit, bus sebanyak 101 unit, dan sepeda motor sebanyak 59.293 unit, dan dibandingkan dengan panjang jalan Kota Dumai 1.198.243 km sehingga rasio panjang jalan Kota Dumai yakni 0,067.

Target yang ditetapkan untuk indikator "Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan" tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 50%. Pada tahun 2022, indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tidak dapat diukur capaiannya dikarenakan satuan target pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai menggunakan satuan persentase (%) sedangkan dalam perhitungan seharusnya dalam bentuk decimal (rasio).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Capaian indikator kinerja utama pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya perbedaan IKU pada periode RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 berbeda dengan periode RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Sehingga yang dapat ditampilkan yakni tabel capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021
Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	10.500	126	1%
Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Layanan Angkutan Darat	0,68	0,03	4%
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	7	5	71%
	Rasio Ijin Trayek	1 : 32.190	1 : 19.799	62%
	Pemasangan Rambu-Rambu	74	203	274%

Tabel Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022
Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%	60%	100%
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	60%	42%	70%
	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	56%	55%	98%
	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	48%	100%
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50%	0.067	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian masing masing Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi “persentase kepemilikan kir angkutan umum” Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 1%, maka dapat dikatakan bahwa capaian di

tahun 2022 lebih tinggi daripada capaian di tahun 2021. Hal ini disebabkan tingginya penetapan target di tahun 2021.

b. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi “persentase sarana dan prasarana perhubungan” Tahun 2022 telah memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2021 karena pada tahun 2021 IKU “Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai.

c. Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi “persentase penyediaan perlengkapan jalan” Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 98%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2021 karena pada tahun 2021 IKU “Persentase penyediaan perlengkapan jalan” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai.

d. Persentase Pembangunan Prasarana Jalan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi “persentase pembangunan prasarana jalan” Tahun 2022 telah memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2021 karena pada tahun 2021 IKU “Persentase pembangunan prasarana jalan” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai.

e. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi “rasio panjang jalan per jumlah kendaraan” Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2021 karena pada tahun 2021 IKU “Persentase pembangunan prasarana jalan” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai.

f. Persentase Layanan Angkutan Darat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi “persentase layanan angkutan darat” tahun 2021 belum memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dengan tingkat capaian IKU sebesar 4%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 karena pada tahun 2022 IKU “persentase layanan angkutan darat” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai.

g. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis” tahun 2021 belum memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dengan tingkat capaian IKU sebesar 71%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 karena pada tahun 2022 IKU “Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai, namun jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis masih tetap sama kondisinya dengan kondisi di tahun 2021 yakni sebanyak 5 unit.

h. Rasio Ijin Trayek

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Rasio ijin trayek” tahun 2021 belum memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dengan tingkat capaian IKU sebesar 62%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 karena pada tahun 2022 IKU “Rasio ijin trayek” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai.

i. Pemasangan Rambu-Rambu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Pemasangan rambu-rambu” tahun 2021 telah melebihi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dengan tingkat capaian IKU sebesar 274%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 karena pada tahun 2022 IKU “pemasangan rambu-rambu” tidak tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai, namun data rambu-rambu yang terpasang di tahun 2022 sebanyak 316 unit dari target 700 dengan persentase 45%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah

Tahun 2022 merupakan tahun awal perencanaan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sehingga realisasi kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan realisasi kinerja IKU sampai dengan tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama s.d Tahun 2022
Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra s.d Tahun 2022	Realisasi s.d Tahun 2022
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%	60%
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	60%	42%
	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	56%	55%
Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Perhubungan	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	48%
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50%	0.067

Dari 5 (lima) IKU seperti tersaji pada tabel diatas, terdapat 3 (tiga) IKU yang realisasinya sampai dengan tahun 2022 tidak memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, diantaranya:

- Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum;
- Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan; dan
- Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Sasaran strategis "Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Perhubungan" diwujudkan dengan pencapaian kelima Indikator Kinerja Utama seperti yang dapat dilihat pada Tabel diatas. Analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja untuk masing masing indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.

b. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 70%.

Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar - benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus uji kir dan membuat pemilik lain enggan untuk menguji;
- Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Dumai kepada pemilik kendaraan/perusahaan angkutan dan masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan dan uji emisi.

c. Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 70%.

Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Belum adanya dokumen perencanaan terkait jumlah perlengkapan jalan dan prasarana jalan yang seharusnya tersedia sehingga penetapan target pada Renstra masih belum didukung dengan data yang akurat;

d. Persentase Pembangunan Prasarana Jalan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam pembangunan prasarana jalan.

e. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 0.067.

Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Satuan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dalam bentuk persentase (%) sedangkan satuan yang sebenarnya tidak dalam bentuk persentase melainkan decimal, sehingga akan diusulkan perubahan satuan target IKU pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan saat dilaksanakannya perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- Dinas Perhubungan tidak memiliki data jumlah kendaraan di Kota Dumai sehingga data yang dimanfaatkan bersumber dari BPS Kota Dumai dan data panjang jalan yang diperoleh dari Dinas PUPR hanya panjang jalan kota, sedangkan pengukuran indikator ini juga memasukkan panjang jalan nasional (belum termasuk jalan tol), dan jalan provinsi.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama tentunya didukung oleh tercapai atau tidaknya *outcome* maupun *output* dari program/kegiatan prioritas. Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai terdapat 2 (dua) program prioritas yang telah ditetapkan, diantaranya (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kedua program tersebut didukung oleh 42 (empat puluh dua) sub

kegiatan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun capaian kinerja terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022
Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	5 dok
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2 dok	2 dok
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	2 dok	2 dok
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	12 bulan
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Orang	13 Orang
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Paket	6 Paket
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	13 Orang	13 Orang
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan

1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61 Unit	61 Unit
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53 Unit	53 Unit
1.6.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit
1.6.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
1.6.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Lokasi	2 Lokasi
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak	90%	90%
2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 dok	5 dok
2.1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 dok	5 dok
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan
2.2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 unit	3 unit
2.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3 jenis	3 jenis

2.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 unit	3 unit
2.2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	12 bulan	12 bulan
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 dok	1 dok
2.3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 dok	3 dok
2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir	1 dok	1 dok
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan	12 bulan
2.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35 unit	35 unit
2.4.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM Penguji yang mengikuti diklat	3 orang	3 orang
2.4.1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan	12 bulan
2.4.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit	12 unit
2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 kegiatan	10 kegiatan
2.5.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan	10 kegiatan	10 kegiatan
2.5.1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan
2.6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok
2.6.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 dok	2 dok
2.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan
2.7.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	5 kegiatan	5 kegiatan
2.8	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok
2.8.1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 dok	1 dok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 seluruh target *outcome/output* dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini karena semakin meningkatnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, pada kenyataannya di tahun 2022 tidak seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran, sehingga realisasinya di tahun 2022 belum memenuhi target yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026. Adapun sub kegiatan dimaksud diantaranya:

1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
3. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
6. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
9. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
10. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
11. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin;
12. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
13. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
14. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;

16. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
17. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
18. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota;
19. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
20. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
21. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
22. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Agar kondisi ini tidak terjadi lagi pada perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan, maka sebaiknya perlu dilakukan analisis yang lebih tepat dalam menentukan program/kegiatan/subkegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan OPD bahan Visi dan Misi Kota Dumai yang terkait dengan pelaksanaan urusan perhubungan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Total anggaran pada DPPA Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 53.188.470.907,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
Dinas Perhubungan Kota Dumai
Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan, 2022

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	31.000.000.000
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.000.0000.00
4	1	02	Retribusi Daerah	30.000.0000.00
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000
5			BELANJA DAERAH	53.188.470.907
5	1		BELANJA OPERASI	45.410.685.932
5	1	01	Belanja Pegawai	9.079.997.032
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.619.688.900
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	711.00.000
5	2		BELANJA MODAL	7.777.784.975
5	2	01	Belanja Modal Tanah	3.505.260.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.289.824.975
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	417.700.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	900.000.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	665.000.000

Realisasi belanja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 51.042.171.358,- atau sebesar 95,96% dari total anggaran pada DPPA Dinas Perhubungan Kota Dumai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2022

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	FISIK	KEU	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,723,464,844	23,168,990,123.81	100.00%	93.71%	1,554,474,719.19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,340,000	30,220,000	100.00%	99.60%	120,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,350,000	24,230,000	100.00%	99.51%	120,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,625,000	4,625,000	100.00%	100.00%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,365,000	1,365,000	100.00%	100.00%	-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,914,977,032	7,481,769,326	100.00%	83.92%	1,433,207,706
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,884,477,032	7,452,835,726	100.00%	83.89%	1,431,641,306
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18,000,000	16,718,600	100.00%	92.88%	1,281,400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,500,000	12,215,000	100.00%	97.72%	285,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74,400,000	73,638,600	100.00%	98.98%	761,400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74,400,000	73,638,600	100.00%	98.98%	761,400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106,397,750	99,724,669	100.00%	93.73%	6,673,081
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27,000,000	26,973,000	100.00%	99.90%	27,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79,397,750	72,751,669	100.00%	91.63%	6,646,081
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,670,122,608	1,664,171,522	100.00%	99.64%	5,951,086
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69,862,800	69,781,780	100.00%	99.88%	81,020
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184,994,026	184,849,669	100.00%	99.92%	144,357
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,788,000	94,738,000	100.00%	99.95%	50,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250,039,782	249,934,561	100.00%	99.96%	105,221
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160,000,000	156,425,572	100.00%	97.77%	3,574,428
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	910,438,000	908,441,940	100.00%	99.78%	1,996,060
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,098,752,520	1,097,659,981.60	100.00%	99.90%	1,092,538
Pengadaan Mebel	150,000,000	149,898,783.75	100.00%	99.93%	101,216
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452,292,520	451,819,000	100.00%	99.90%	473,520
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	30,000,000	29,992,000	100.00%	99.97%	8,000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	200,000,000	199,855,500	100.00%	99.93%	144,500
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266,460,000	266,094,697.85	100.00%	99.86%	365,302
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,676,167,058	9,573,969,654	100.00%	98.94%	102,197,404
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,168,000	6,000,000	100.00%	83.71%	1,168,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769,642,280	762,620,100	100.00%	99.09%	7,022,180
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,899,356,778	8,805,349,554	100.00%	98.94%	94,007,224
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,152,307,876	3,147,836,371.21	100.00%	99.86%	4,471,504.79

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,009,999,054	1,009,641,189	100.00%	99.96%	357,865
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	984,572,822	984,083,920	100.00%	99.95%	488,902
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,157,736,000	1,154,111,263.21	100.00%	99.69%	3,624,737.79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28,465,006,063	27,873,181,234.81	100.00%	97.92%	591,824,828.19
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	500,000,000	499,533,300	100.00%	99.91%	466,700
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	500,000,000	499,533,300	100.00%	100.00%	466,700
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	23,791,715,837	23,748,795,535.30	100.00%	99.82%	42,920,301.70
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,244,071,000	1,228,863,506.01	100.00%	98.78%	15,207,493.99
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4,698,544,453	4,691,616,878.35	100.00%	99.85%	6,927,574.65
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	303,000,000	302,500,130.24	100.00%	99.84%	499,869.76
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17,546,100,384	17,525,815,020.70	100.00%	99.88%	20,285,363.30
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,156,612,200	1,153,924,122.36	100.00%	99.77%	2,688,077.64
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	912,612,200	911,015,622.36	100.00%	99.83%	1,596,577.64
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	244,000,000	242,908,500	100.00%	99.55%	1,091,500
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,022,963,762	1,011,670,381.15	100.00%	98.90%	11,293,380.85
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	463,424,820	460,933,500	100.00%	99.46%	2,491,320
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70,134,834	62,721,883	100.00%	89.43%	7,412,951
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55,004,108	54,637,000	100.00%	99.33%	367,108
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	434,400,000	433,377,998.15	100.00%	99.76%	1,022,001.85
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551,400,000	550,056,374	100.00%	99.76%	1,343,626

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	531,400,000	530,309,874	100.00%	99.79%	1,090,126
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20,000,000	19,746,500	100.00%	98.73%	253,500
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100,000,000	99,855,600	100.00%	99.86%	144,400
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100,000,000	99,855,600	100.00%	99.86%	144,400
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,292,314,264	759,345,922	100.00%	58.76%	532,968,342
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1,292,314,264	759,345,922	100.00%	58.76%	532,968,342
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	50,000,000	100.00%	100.00%	-
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	50,000,000	100.00%	100.00%	-
	53,188,470,907	51,042,171,358.62	100.00%	95.96%	2,146,299,548.38

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan Program Non Urusan/rutin Dinas Perhubungan guna menunjang tugas dan fungsinya, dalam melaksanakan urusan tersebut Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 24.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.230.000,- atau 99,51% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja keluaran 2 dokumen dan terealisasi 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 4.625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.625.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen RKA SKPD dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp1.365.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.365.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan target kinerja keluaran 2 dokumen dan terealisasi 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 8.884.477.032,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.452.835.726,- atau 83,92% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja keluaran 14 bulan dan terealisasi 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.718.800,- atau 92,88% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan target keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 12.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.215.000,- atau 97,72% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan keuangan semesteran dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 74.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 73.638.600,- atau 98,98% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 27.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 26.973.000,- atau 99,90% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya dengan target kinerja keluaran 6 paket realisasi 100%.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 79.397.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 72.751.669,- atau 91,63% dengan indikator keluaran (output) Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target kinerja keluaran 13 orang dan terealisasi 100%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 69.862.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 69.781.780,- atau 99,88% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 184.994.026,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 184.849.669,- atau 99,92% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 94.788.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 94.738.000,- atau 99,95% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan bahan logistik kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 250.039.782,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 249.934.561,- atau 99,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 160.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 156.425.572,- atau 97,77% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 910.438.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 908.441.940,- atau 99,78% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 149.898.784,- atau 99,93% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target kinerja keluaran 3 paket dan terealisasi 100%.

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 452.292.520,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 451.819.000,- atau 99,90% dengan indikator keluaran (output) Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target kinerja keluaran 53 unit dan terealisasi 100%.

3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 29.992.000,- atau 99,97% dengan indikator keluaran (output) Jumlah unit aset lainnya yang disediakan dengan target kinerja keluaran 2 unit dan terealisasi 100%.

4. Pengadaan Aset Tak Berwujud

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 199.855.500,- atau 99,93% dengan indikator keluaran (output) Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 unit dan terealisasi 100%.

5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 266.460.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 266.094.698,- atau 99,86% dengan indikator keluaran (output) Jumlah gedung kantor yang dibangun dengan target kinerja keluaran 2 lokasi dan terealisasi 100%.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 7.168.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.000.000,- atau 83,71% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan surat menyurat dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 769.642.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 762.620.100,- atau 99,09% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 8.899.356.778,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.805.349.554,- atau 96,94% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan jasa

pelayanan umum kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 1.009.999.054,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.009.641.189,- atau 99,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 984.572.822,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 984.083.920,- atau 99,95% dengan indikator keluaran (output) Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 1.157.736.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.154.111.262,- atau 99,69% dengan indikator keluaran (output) pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target kinerja keluaran 9 unit dan terealisasi 100%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 499.533.300,- atau 99,91% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen

penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 5 dokumen dan terealisasi 100% yakni sebagai berikut:

- DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor;
- DED Pendestrian Jl. H. R. Soebrantas;
- DED Pendestrian Jl. Putri Tujuh;
- DED Pembangunan Parkir Khusus Ramayana; dan
- DED Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah.

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 1.244.071.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.226.863.508,- atau 98,78% dengan indikator keluaran (output) Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 2 Unit dan terealisasi 100% yakni lanjutan pembangunan Pendestrian Bumi Ayu dan pemeliharaan Pendestrian Jl. Soekarno Hatta (Simp. Janur Kuning – Imam Munandar).

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 4.693.544.453,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.691.616.879,- atau 99,85% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 3 Jenis dan terealisasi 100% yakni pengadaan penerangan jalan umum di Kota Dumai, pengadaan marka jalan dan rambu lalu lintas.

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 303.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 302.500.130,- atau 99,84% dengan indikator keluaran (output) Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara dengan target kinerja keluaran 3 unit dan terealisasi 100% yakni pemeliharaan kanstin Jl. Raya Bukit Datuk, rehab median Jl. Putri Tujuh depan SMAN 2 Dumai dan Jl. Sultan Syarif Kasim.

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 17.546.100.384,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.525.815.020,- atau 99,88% dengan indikator keluaran (output) Jumlah pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100% yakni rehab Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Dumai termasuk pembayaran tagihan listrik PJU, rehab lampu RGB, papan nama pengaduan serta pemeliharaan traffic light, warning light, rambu RPPJ/Kantilever dan rambu tiang tunggal.

2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 912.612.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 911.015.622,- atau 99,83% dengan indikator keluaran (output) jumlah dokumen pemenuhan persyaratan peroleh izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target kinerja keluaran 3 dokumen dan terealisasi 100% yakni naskah akademis penyelenggaraan parkir di Kota Dumai, rehab pos retribusi Bukit Timah dan Rawa Panjang serta rehab gedung kantor UPT. Perparkiran.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 244.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 242.908.500,- atau 99,55% dengan indikator keluaran (output) jumlah pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100% yakni Dokumen survey potensi perparkiran di Kota Dumai.

3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 463.424.820,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 460.933.500,- atau 99,46% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan target kinerja keluaran 35 unit dan terealisasi 100% yakni Pengadaan Side Slipe Tester, Pengadaan Server Penguji, Pengadaan Printer Cetak Kartu RFID, Pengadaan Laptop, Komputer, AC, Handy Talky dan Pengadaan Aplikasi e-Money UPT. PKB.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 70.134.834,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 62.721.883,- atau 89,43% dengan indikator keluaran (output) Jumlah SDM penguji yang mengikuti diklat dengan target kinerja keluaran 3 orang dan terealisasi 100% yakni Diklat Penguji Tingkat III yang diikuti oleh 1 orang, Diklat Penguji Tingkat IV diikuti oleh 1 orang dan Diklat Penguji Tingkat V diikuti oleh 1 orang.

3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 55.004.108,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 54.637.000,- atau 99,33% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan bukit lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 434.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 433.377.998,- atau 99,76% dengan indikator keluaran (output) Jumlah sarana dan

prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara dengan target kinerja keluaran 12 unit dan terealisasi 100%.

4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 531.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 530.309.874,- atau 99,79% dengan indikator keluaran (output) Jumlah kegiatan penertiban dan pemeriksaan dengan target kinerja keluaran 10 kegiatan dan terealisasi 100% yakni Kegiatan pengaturan dan Penertiban Jam Larangan Angkutan Barang, Pam Lalin di persimpangan, Pasar, Sekolah, dan Simpang Traffic dan Kegiatan pengawasan dan penertiban lainnya.

2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 19.746.000,- atau 96,73% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1 Laporan dan terealisasi 100% yakni laporan hasil pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Dumai.

5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 99.855.600,- atau 99,86% dengan indikator keluaran (output) Jumlah kebijakan tata kelola andalain dengan target kinerja keluaran 2 dokumen dan terealisasi 100% yakni Dokumen Andalalin Pasar Kelakap Tujuh dan Pasar Lepin Kota Dumai.

6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 1.292.314.264,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 759.345.922,- atau 58,76% dengan indikator keluaran (output) Jumlah pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru dengan target kinerja keluaran 5 kegiatan dan terealisasi 100%.

7. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah kebijakan tata kelola andalalin yang ditetapkan dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100% yakni dokumen laporan Pembinaan dan Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang di Kota Dumai.

Perbandingan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2021 dengan tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 dengan Tahun 2022
Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

URAIAN	PAGU (Rp)		REALISASI			
			2021		2022	
	2021	2022	Rp	%	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.721.466.947	24.723.464.844	19.964.106.190	87.86	23.168.990.123,81	93.71
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24.951.299.417	28.465.006.063	24.818.034.740	99.47	27.873.181.234,81	97.92
TOTAL	47.672.766.364	53.188.470.907	44.782.140.930	93.67	51.042.171.358,62	95.96

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 lebih tinggi dari pada realisasi anggaran tahun 2021, artinya kinerja keuangan di tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun 2021.

3.3 Penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai

Pada tahun anggaran 2022 tidak ada penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, kondisi tersebut akan dijadikan semangat dan memotivasi Dinas Perhubungan Kota Dumai agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) **Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 60%. Sampai tahun 2022, sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kota Dumai sebanyak 42 unit dengan target 70 unit. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

b) **Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum**

Persentase kepemilikan kir angkutan umum tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 60%. Jumlah angkutan umum yang memiliki kir di tahun 2022 sebanyak 124 unit dibanding dengan jumlah angkutan umum pada tahun 2022 sebanyak 297 unit. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 70%.

c) **Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan**

Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan” tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 56%. penyediaan perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan dengan rata-rata capaian sebesar 55%. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 98%.

d) **Persentase Pembangunan Prasarana Jalan**

Persentase Pembangunan Prasarana Jalan” tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 48%. Berdasarkan data, pembangunan prasarana jalan tahun 2022 adalah sebesar 48%. Artinya,

realisasi indikator ini di tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

e) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tahun 2022 pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebesar 50%. Pada tahun 2022, indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tidak dapat diukur capaiannya dikarenakan satuan target pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai menggunakan satuan persentase (%) sedangkan dalam perhitungan seharusnya dalam bentuk decimal (rasio).

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2022, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Meninjau ulang kelayakan Indikator Kinerja Utama serta dasar penetapan target kinerja;
2. Menyusun dokumen perencanaan di bidang perhubungan yang akan dijadikan acuan dalam penetapan target kinerja seperti kebutuhan perlengkapan jalan, dan prasarana jalan di Kota Dumai;
3. Meningkatkan kesadaran kepada perusahaan angkutan, pemilik kendaraan/masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan dengan melaksanakan sosialisasi yang pada akhirnya hal tersebut juga dapat meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah dari Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Perlu terus memantapkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan peran, fungsi, dan tanggungjawab serta keahlian dan keterampilan teknis penguji kendaraan bermotor.